

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB SOLOK**



OLEH

NAMA : IQBAL RAWI SIREGAR

NPM : 191000474201047

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK

2023

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB SOLOK**

**Nama : Iqbal Rawi Siregar, NPM : 191000474201047, Fakultas Hukum
Universitas Mahaputra MuHak Asasi Manusia mad Yamin Solok.**

**Pembimbing I : Dr. Aermadepa, S.H. M.H, Pembimbing II : Yulfa Mulyeni,
SH. MH, Hal :79, Tahun 2023**

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia (RI) sebagai lembaga kekuasaan tertinggi mempunyai kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia warganya melalui sarana hukum yang terintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diberikan kepada masyarakat, sehingga sering digunakan sebagai indikator keberhasilan suatu rezim pemerintahan. Dengan kondisi yang belum maksimal terutama pada pelayanan berbasis Hak Asasi Manusia , dalam rangka mewujudkan *good governance*. Rumusan penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok. 2) Apa sajakah kendala dan upaya yang dihadapi dalam Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok. Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis sosiologis*, Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: 1) Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 22 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok belum cukup baik. Adapun tiga kriteria yang belum dipenuhi dari enam kriteria sesuai PermenkumHak Asasi Manusia No 2 Tahun 2022 adalah Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas Pengunjung, Ketersediaan Sumber Daya manusia dan Petugas, dan Inovasi Pelayanan Publik. 2) Masalah-masalah yang yang ditemukan diantaranya belum adanya program kerja dan rencana anggaran yang tersedia untuk mempersiapkan sarana dan fasilitas pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia , selanjutnya belum terpenuhi realisasi penambahan petugas yang sesuai dengan kebutuhan jumlah warga binaan di Lapas Solok oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat terkait kekurangan kebutuhan sumber daya manusia, dan masih kurangnya petugas pemasyarakatan yang berkompeten untuk dapat berinovasi terkait pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia .

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sujatno, 2008, **Pencerahan di Balik Penjara**, Jakarta: UI Press
- Amiruddin, 2012, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bagong Suyanto, 2010, **Masalah Sosial Anak**, Jakarta : Kencana Prenda Media Group
- Djisman Samosir, 2012, **Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasarakatan**. Bandung: Nuansa Aulia
- Dwija Priyatno, 2006, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia**. PT Refika Aditama: Bandung
- Dwiyanto, Agus, 2015, **Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif**, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press
- Eva Achjani Zulfa. 2011. **Pergeseran Paradigma Pemidanaan**, Bandung: CV. Lubuk Agung
- Fenti Hikmawati, 2020, **Metodologi Penelitian**, Jakarta: Rajawali Pers
- Hardiyansyah, 2018, **Kualitas Pelayanan Publik**, Yogyakarta: Gava Media
- Joko Widodo, 2000, **Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Control Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah**, Surabaya: Insan Cendikia
- Mahmudi, 2010, **Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi kedua**, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Press
- Masyhur Effendi, 1994, **Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional**, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moenir, 2014, **Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia**, Jakarta: Bumi Aksara

- Mulyasa E, 2013, **Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan**, Jakarta: Bumi Aksara
- Nurdin Usman, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, Jakarta, 2022: Grasindo
- Pandji Santoso, 2009, **Administrasi Publik–Teori dan Aplikasi Good Governance**, Revika Aditama, Bandung. Jakarta: Bumi Aksara
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM
- Purwanto, Sulistyastuti, 1991, **Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan**, Jakarta: Bumi Aksara
- Putra, Fadhilla, 2012, **New Public Governance**, Malang: UB Press
- Romli Atmasasmita, 1982, **Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia**, Bandung: Perpustakaan UI
- Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: UI Press
- Solichin Abdul Wahab, 2012, **Implementasi Kebijaksanaan Negara**, Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono, 2010, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**, CV Bandung: Alfabeta
- Suyanto Bagong, 2010, **Masalah Sosial Anak**. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, **Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani**. Jakarta: Prenada Media
- Tutik, Titik Triwulan, 2015, **Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945**, Jakarta: Prenadamedia
- Usman Nurdin, 2002, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**. Jakarta: Grasindo

WibowoWahyu, 2014, **Pengantar Hukum HakAsasiManusiaMiliter**, Jakarta:
Perpustakaan Universitas Siliwangi

JURNAL

Halawa, I. V, Pelaksanaan Jaminan Hak Asasi Manusia Klien Pemasarakatan Dalam Pelayanan Publik Bapas Klas ISurabaya 2021. *Jurnal Politeknik Ilmu Pemasarakatan*, 4 (8) hlm. 729- 736. Tapsel. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Tapsel

Pasaribu, P. Y., & Briando, B, Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM Sebagai Perwujudan Tata Nilai “PASTI” Kemenkumham: *Jurnal HAM*, 10(1), Hlm. 39. Depok. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ardiyan Saptawan,2009,
PengembanganPraktikPelayananPrimaDalamKebijakanPemerintah,*Jurna IlmuAdministrasi Negara* 9, no. 2 (2009): 114–122, ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/106

Tenang Haryanto, Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen.*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*. 2 (8), Hlm 137-143. Purwekerto. Official Journal Faculty of Lawa Unsoed.

Khoiron, Pelayanan Publik dan Keadilan Sosial, *Jurnal Universitas Merdeka*, 1 (2) hlm 43. Malang. OfficialJournalofPublicAdministration Sains UNMER.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang No. : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003.

TAPMPRRINomorXVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia

